

Nomor : 67/Surat Terbuka_JSKK/I/2009

Jakarta, 22 Januari 2009

Hal : **Jangan Pilih Partai Politik (Parpol)**

Yang Melindungi Para Pelanggar HAM

Kepada Yth,

Presiden Republik Indonesia

Bapak Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono

Di –Jakarta

Bapak Presiden Yang Kami Hormati,

Kami keluarga korban yang tergabung dalam JSKK kembali hadir didepan Istana Negara untuk menggelar aksi diam kamisan yang ke 96, bersama kami, turut hadir pula dukungan masyarakat, pemuda dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan dukungan kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat baik yang terjadi dimasa lalu seperti **pembantaian 1965-1966, kasus Tanjung Priok 1984, Penembakan Misterius (PETRUS) 1983-1984, Talangsari Lampung 1989, Trisakti, Semanggi I&II, Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan paksa aktivis 1997-1998** dan lain – lain.

Selain itu, hingga saat ini masih banyak kasus-kasus lainnya yang terus terjadi dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia, khususnya ancaman penggusuran paksa terhadap rumah tempat tinggal saudara-saudari kami para Purnawirawan TNI yang tinggal di **komplek perumahan Dwikora Cimanggis, Komplek Badak Putih I Kota Bumi Bogor, Komplek Lawang Gintung Den Pom Bogor, Komplek KPAD Geger Kalong Bandung, seluruh Komplek TNI AD Makasar dan Komplek Sat Rudal TNI AU Tangerang**. Melihat kondisi diatas, tentu kami memahami, tidak mudah tugas dan kewajiban bapak presiden beserta segenap aparat jajaran untuk menyelesaikan kasus –kasus tersebut dan khususnya memulihkan hak para korban kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun demikian, kami tetap mendorong agar pemerintah memberikan prioritas dan menunjukkan keseriusan terhadap kasus-kasus tersebut diatas dengan tetap mengacu pada koridor dan instrumen hukum HAM yang tidak sedikit sudah kita adopsi dalam berbagai peraturan perundangan ditingkat nasional.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Kasus terakhir yang membuktikan bahwa belum maksimalnya penegakan HAM di Indonesia adalah vonis bebas terhadap Muchdi Purwoprandjono salah satu terdakwa kasus pembunuhan aktivis HAM Munir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka sangat perlu disadari bahwa ternyata para pelanggar HAM masih bebas berkeliaran di alam demokrasi kita, bahkan tidak sedikit dari mereka yang akan berpartisipasi dalam pemilu sebagai calon anggota legislatif dan calon presiden dan wakil presiden RI. Kenapa bisa demikian ?Hal ini akibat partai politik peserta pemilu tanpa rasa malu dan tidak ragu-ragu terus mencalonkan mereka yang memiliki catatan kelam pelanggaran HAM.

Namun perlu diingat, rakyat sudah semakin cerdas dalam menentukan pilihan dan hal ini akan terpulang kembali kepada parpol, apakah akan berpihak dan terus memberikan tempat perlindungan kepada para pelanggar HAM atau rakyat akan berpaling muka sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada parpol. Melihat hal itu, tentu wajar jika rakyat pesimis dan semakin menjamurnya ancaman golput karena belum ada keseriusan dan itikad baik dari Parpol-parpol peserta pemilu untuk menghadirkan wakil rakyat dan pemimpin yang bersih, tidak memiliki catatan pelanggaran HAM dan tentu saja yang paling penting berpihak kepada para korban dan masyarakat yang terpinggirkan hak-hak nya sebagai warga negara.

Jakarta, 22 Januari 2009

JSKK,

Sumarsi

Suciwati

Bedjo Untung

Tembusan kepada yth:

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI
2. Bapak Ketua Komnas HAM